PRAKIRAAN ANGKA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PASCA PEMEKARAN

Oleh:

Ahmad Yani

Abstrak:

Pemekaran Bandung Barat dari Kabupaten Bandung semakin banyak dukungan. Menurut rencana akan mengambil 15 kecamatan dari Kabupaten Bandung dengan total luas 130.578 hektar (42 persen dari luas Kabupaten Bandung saat ini). Tulisan ini mencoba melihat dampak paling awal jika pemekaran dilakukan khususnya dari aspek angka IPM yang akan diperoleh pasca pemekaran. Dengan pendekatan deskriptif yang datanya diambil dari berbagai sumber dan dokumentasi, menunjukkan bahwa "calon" Kabupaten Bandung Barat ini akan mendapat "bekal" angka IPM sekira 65,1 dan akan menduduki peringkat ke-16 di Propinsi Jawa Barat. Suatu resiko yang menuntut kerja keras dari warga Bandung Barat sesaat setelah pemekaran diresmikan.

PENGANTAR

Rencana Pemekaran Bandung Barat dari Kabupaten Bandung menurut beberapa pengamat diperkirakan dapat dipercepat setelah usulan pemekaran tersebut disetujui DPRD Kabupaten Bandung pada Selasa 20 Juli 2004. Apalagi desakan sebagian masyarakat di Bandung Barat semakin gencar menekan kepada semua pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pemekaran. Menurut rencana, pemekaran Bandung Barat ini mengambil 15 kecamatan dari Kabupaten Bandung dengan total luas 130.578 hektar (42 persen dari luas Kabupaten Bandung saat ini). Kecamatan tersebut adalah Lembang, Cisarua, Parongpong, Ngamprah, Padalarang, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cipatat, Batujajar, Cililin, Cihampelas, Sindangkerta, Rongga, Gununghalu, dan Kecamatan Cipongkor. Tim yang ditunjuk untuk mengkaji pemekaran ini antara lain dari Universitas Padjadjaran, Universitas Ahmad Yani, dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (Kompas, 22 Juli 2004).

Pihak-pihak yang mendukung terhadap pemekaran Kabupaten Bandung Barat hampir semuanya bersikap optimis bahwa Bandung Barat dapat berdiri sendiri jika sudah dilepas dari Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil studi dikatakan, bahwa secara teknis pembentukan Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki masalah yang berati. Aspek luas wilayah dan jumlah penduduk sudah terpenuhi, bahkan secara politis salah satu fraksi di

DPRD Kabupaten Bandung menegaskan bahwa pembentukan Kabupaten Bandung Barat merupakan alternatif paling ampuh dalam mengatasi ketertinggalan wilayah ini.

Semua dukungan dan harapan di atas tidak dapat disalahkan, namun secara ilmiah alternatif yang dianggap "ampuh" tersebut baru bersifat hipotetik yang perlu diuji lebih lanjut. Studi yang sekarang sedang dilakukan mudah-mudahan dapat menunjukkan hasilnya dengan benar dan jujur, sehingga rakyat yang "kebetulan" menjadi warga Bandung Barat tidak menjadi korban kepentingan sesaat. Tulisan ini mencoba melihat dampak paling awal jika pemekaran dilakukan khususnya dari aspek angka IPM yang akan diperoleh pasca pemekaran. Artinya jika 15 kecamatan tersebut telah menjadi Kabupaten Bandung Barat, pertanyaan ***pertama*** adalah berapa kira-kira "bekal" IPM yang akan diperoleh dan pada peringkat ke berapa Kabupaten Bandung di antara kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. ***Kedua***, Prioritas apakah yang perlu ditingkatkan lebih awal untuk menaikkan angka IPM dalam rangka meraih angka 80 pada tahun 2008 sebagaimana yang ditargetkan pada tingkat Provinsi Jawa Barat?

TINJAUAN PUSTAKA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang dijadikan alat ukur dalam pemantauan pembangunan manusia, terutama dalam mengukur kualitas fisik penduduk di suatu daerah. Karena itu, IPM dijadikan standar keberhasilan kebijakan pembangunan yang komprehensif dan memadai dan dijadikan tolok ukur kemajuan pembangunan manusia (Bapeda Kabupaten Bandung, 2003).

Menurut Arizal Ahnaf, dkk yang dimuat dalam laporan penelitian IPM Kabupaten Bandung (Bapeda Kabupaten Bandung, 2003) menyatakan bahwa komponen IPM terdiri atas usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Usia hidup diukur dari angka harapan hidup atau e_o yang dihitung dari variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan.

Rumus perhitungan IPM yang dikutip dari Arizal Ahnaf, dkk sebagaimana yang ditulis kembali pada laporan penelitian IPM Kabupaten Bandung disajikan sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)})$$

Di mana:

$X_{(1)}$ = Indeks harapan hidup

$X_{(2)}$ = Indeks pendidikan (2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah)

$X_{(3)}$ = Indeks standar hidup layak

Walaupun dikatakan bahwa IPM adalah tolok ukur pembangunan manusia di suatu daerah tertentu, tetapi menurut Saeful Millah (2004) angka IPM bukan satu-satunya alat ukur yang bisa menggambarkan secara paripurna kualitas sumberdaya manusia. Tetapi dengan ketiga indikator pokoknya itu – kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan – konsep IPM bisa dijadikan salah satu instrumen untuk mengungkap bagaimana sebuah daerah dengan kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya mampu menjamin setidaknya tiga pilihan paling dasar bagi penduduknya; pilihan untuk berumur panjang, pilihan untuk memiliki pengetahuan, dan pilihan untuk bisa hidup layak.

Secara nasional, menurut Laporan Pembangunan Manusia 2003 oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) sebagaimana dikutif oleh Mar'ie Muhmmad (2003) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2001 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2000, yaitu dari 175 negara, Indonesia menempati urutan ke-112, lebih rendah ketimbang tahun 2000 yang menempati urutan ke-110. Dan peringkat Indonesia ini lebih rendah dibanding Thailand, Filipina, bahkan Vietnam, tapi lebih baik daripada Kamboja dan Myanmar.

Pada tingkat nasional, Jawa Barat menduduki urutan ke 17 dari seluruh propinsi di Indonesia berdasarkan angka perolehan IPM-nya yaitu dengan angka 65,8 pada tahun 2004 yang persis sama dengan rata-rata tingkat nasional. Sementara itu, pada tingkat Jawa Barat, kabupaten/kota yang menduduki peringkat 1 adalah Kota Depok dengan angka IPM 73,9 disusul oleh Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi,

Kota Cirebon, dan pada tingkat ke tujuh adalah Kabupaten Bandung dengan angka IPM 68,8.

Kaitannya dengan masalah pemekaran daerah, pemerintah telah mengeluarkan peraturan nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Pada peraturan tersebut, kriterianya diatur pada Bab IV pasal 13 yang menyatakan bahwa Pemekaran Daerah dapat dilakukan berdasarkan kriteria:

(a) kemampuan ekonomi,
(b) potensi daerah,
(c) sosial budaya,
(d) sosial politik,
(e) jumlah penduduk,
(f) luas daerah, dan
(g) pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.

Dalam lampiran peraturan tersebut diuraikan bahwa syarat atau kriteria tersebut dibagi atas 19 indikator dan 43 sub indikator. Ke 19 indikator tersebut adalah (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (2) Penerimaan Daerah sendiri, (3) Lembaga keuangan, (4) Sarana dan prasarana ekonomi, (5) sarana pendidikan, (6) Sarana kesehatan, (7) Sarana transportasi dan komunikasi, (8) Sarana pariwisata, (9) Ketenagakerjaan, (10) tempat peribadatan, (11) Tempat/kegiatan institusi sosial, (12) Sarana olah raga, (13) Partisipasi masyarakat dalam berpolitik, (14) Organisasi kemasyarakatan, (15) Jumlah penduduk, (16) Luas daerah, (17) keamanan dan ketertiban, (18) Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan, dan (19) rentang kendali. Setiap kelompok syarat/kriteria tersebut memiliki bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom. Bobot untuk kemampuan ekonomi adalah 25, potensi daerah adalah 20, sosial budaya adalah 10, sosial politik adalah 10, jumlah penduduk adalah 15, luas daerah adalah 15, dan pertimbangan lain-lainnya adalah 5. Total seluruh bobot adalah 100.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang datanya diambil dari berbagai sumber yaitu jurnal ilmiah, artikel koran, buku referensi, dan berita lain baik dari media cetak maupun elektronik. Kategori media cetak antara lain surat kabar sedangkan kategori media elektronik diambil dari internet. Untuk melengkapi informasi, dalam penelitian ini juga studi dokumentasi yang tersedia pada BPS dan Hasil Susenas dan sumber lain dari Bapeda Kabupaten Bandung, dan kajian peraturan atau perundang-undangan yaitu PP Nomer 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dabn Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

HASIL PENELITIAN

Sebagaimana dijelaskan pada pendahuluan, bahwa pemekaran Kabupaten Bandung Barat akan "mengambil" 15 kecamatan yaitu Kecamatan Lembang, Cisarua, Parongpong, Ngamprah, Padalarang, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cipatat, Batujajar, Cililin, Cihampelas, Sindangkerta, Rongga, Gununghalu, dan Kecamatan Cipongkor. Dalam penelitian ini akan menggunakan data tahun 2001 di mana, khususnya, kecamatan Cihampelas belum memiliki data. Karena itu dalam setiap tampilan tabel dan perhitungannya tidak akan diperhitungkan. Perhatikan posisi Bandung Barat pada peta berikut:

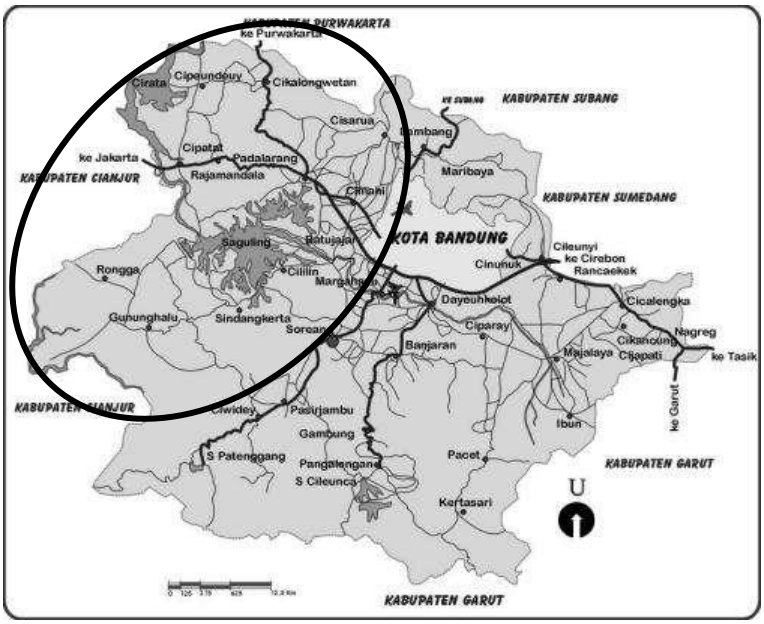

Gambar 1: Peta Kabupaten Bandung

Sesuai dengan pertanyaan ***pertama*** dalam penelitian ini yaitu berapa kira-kira "bekal" IPM yang akan diperoleh dan pada peringkat ke berapa Kabupaten Bandung di antara kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Data yang bersumber dari BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2003 "calon" Kabupaten Bandung Barat ini akan mendapat "bekal" angka IPM sekira 65,1. Lihat tabel berikut:

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Bandung Barat

No	Kecamatan	AHH	AMH	RLS	PPP	IPM	Ranking
1	Cililin	64,7	99,2	7,4	522,4	66,7	24
2	Sindangkerta	63,9	98,7	6,3	517,0	64,9	34
3	Gununghalu	61,3	96,5	5,8	529,7	63,6	40
4	Rongga	60,1	91,1	5,5	515,0	60,4	43
5	Cipongkor	56,4	98,6	5,8	522,9	60,8	42
6	Batujajar	63,3	96,6	7,5	520,2	65,2	32
7	Lembang	65,4	99,2	7,1	541,0	68,4	6
8	Parongpong	67,0	97,7	7,8	520,2	67,8	15
9	Cisarua	63,6	91,2	8,0	518,3	64,4	36
10	Ngamprah	61,3	98,4	8,0	526,0	65,4	31
11	Padalarang	62,1	99,6	8,1	535,4	66,9	21
12	Cipatat	62,6	94,9	6,6	534,1	64,9	33
13	Cipeundeuy	63,8	96,5	7,6	519,4	65,5	29
14	Cikalong Wetan	65,6	95,9	5,7	529,2	65,8	26
15	Cihampelas	-	-	-	-	-	-
	Rata-rata	62,9	96,7	6,9	525,1	65,1	
	Kabupaten Bandung	65,4	97,5	7,7	530,2	67,5	

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2003, dan Bapeda Kabupaten Bandung.

Keterangan:
AHH = Angka Harapan Hidup
AHM = Angka Melek Huruf
RLS = Rata-rata Lama Sekolah
PPP = *Purchasing Power Parity* (daya beli per unit)
IPM = Indek Pembangunan Manusia
Rangking (rangking di Kabupaten Bandung pada saat sekarang)

Bekal IPM yang akan diperoleh Bandung Barat setelah pemekaran nanti berdasarkan Tabel 1 di atas adalah sekitar 65,1 di bawah rata-rata Kabupaten Bandung sekarang yang telah mencapai 67,5. Selisih angka 2,4 bukan angka yang kecil apalagi jika

diperbadingkan dengan cita-cita Jawa Barat pada tahun 2008 yang menghendaki angka IPM 80. Konsekwensi rendahnya "bekal" angka IPM tersebut akan menjadi beban Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat di kemudian hari. Selanjutnya, jika dilihat dari peringkatnya di Jawa Barat, Bandung Barat diperkirakan akan menduduki posisi ke-16 yaitu menggeser Kabupaten Kuningan. Setelah "melepas" Bandung Barat, Kabupaten Bandung juga akan mengalami penurunan angka IPM yaitu menjadi 67,13 dari semula 67,5.

Dari seluruh indikator yang menentukan IPM, Bandung Barat seluruhnya di bawah rata-rata Kabupaten Bandung, baik Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah maupun Daya Beli Masyarakatnya. Dalam menghadapi masalah tersebut, prioritas apakah yang perlu dikedepankan jika ingin menaikkan IPM secara signifikan?. Untuk menjawab pertanyaan ini tentu saja harus dilihat kondisi riil pada masing-masing pendukung IPM. Dari ketiga komponen IPM, di bawah ini akan dibahas pada tiga aspek saja yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi IPM, yaitu masalah beban tangunggungan penduduk, masalah angka partisipasi pendidikan, dan daya beli masyarakat. Masalah kesehatan, belum dibahas pada tulisan ini dengan sejumlah alasan keterbatasan teknis penelitian. Hal yang dianggap strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. ***Memperhatikan angka beban tanggungan yang masih relatif tinggi***. Angka beban tanggungan merupakan angka yang banyak mempengaruhi berbagai aspek kependudukan. Artinya jika ada keinginan untuk menurunkan angka beban tanggungan maka pertumbuhan penduduk harus diperhatikan, dan konsekwensi lanjutannya adalah bagaimana program kesehatan dan keluarga berencana dapat ditangani dengan baik. Tabel berikut adalah data yang menunjukkan beban tanggung di Bandung Barat perkecamatan:

Tabel 2 Angka Beban Tanggung di Bandung Barat

No	Kecamatan	Usia Penduduk			Angka Ketergantungan
		0 - 14	15 - 64	65 +	
1	Cililin	50,797.00	106,230.00	8,584.00	55.90
2	Sindangkerta	-	-	-	-
3	Gununghalu	20,612.00	41,812.00	3,674.00	58.08
4	Rongga	16,815.00	32,214.00	1,416.00	56.59
5	Cipongkor	27,825.00	44,620.00	3,568.00	70.36

6	Batujajar	28,358.00	68,838.00	2,816.00	45.29
7	Lembang	52,834.00	89,557.00	5,595.00	65.24
8	Parongpong	24,921.00	48,720.00	5,007.00	61.43
9	Cisarua	16,281.00	38,391.00	2,814.00	49.74
10	Ngamprah	31,626.00	75,246.00	15,174.00	62.20
11	Padalarang	45,154.00	85,014.00	5,284.00	59.33
12	Cipatat	36,275.00	64,236.00	8,042.00	68.99
13	Cipeundeuy	20,480.00	48,070.00	1,466.00	45.65
14	Cikalong Wetan	31,185.00	62,865.00	5,803.00	58.84
15	Cihampelas	-	-	-	-
	Rata-rata				58.28

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2003, dan Bapeda Kabupaten Bandung.

Berdasarkan data di atas, rata-rata beban tanggungan dari 100 orang penduduk yang produktif di Bandung Barat akan menanggung 58,28 orang penduduk yang tidak produktif. Artinya bagi penduduk yang produktif selain menanggung dirinya sendiri menangung pula keluarganya yang belum/tidak produktif. Jika Bandung Barat menghendaki peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satu jalannya adalah bagaimana menurunkan angka beban tanggungan dengan penurunan angka pertumbuhan penduduk.

2. ***Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan***. Peningkatan angka partisipasi pendidikan secara signifikan akan dapat meningkatkan indeks melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Di bawah ini adalah gambaran Angka Partisipasi dari pendidikan dasar sampai menengah atas.

Tabel 3 Angka Partisipasi Murni di Bandung Barat

No	Usia Anak	Tidak/Belum pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak bersekolah lagi	Jumlah	APM
1	7 – 12 tahun	972	172,618	3,942	177,532	97,23
2	13- 15 tahun	776	48,456	16,330	65,562	73.91
3	16 – 18 tahun	1,186	13,867	48,459	63,512	21.83

Sumber: Bapeda Kabupaten Bandung, 2003.

Dilihat dari Tabel 3 di atas, APM di Kabupaten Bandung relatif rendah. Dari 100 anak usia sekolah SD (7- 12 tahun) masih terdapat 3 orang anak yang tidak/putus

sekolah. Pada tingkat SMP/MTs, dari 100 anak usia 13 – 15 tahun masih terdapat 26 orang yang putus sekolah. Dan pada tingkat SMA/MA dari 100 anak usia 16 – 18 tahun, masih terdapat 79 anak yang putus sekolah. Rendahnya APM di atas akan menjadi beban pemerintah daerah karena selain harus meningkatkan akses pendidikan juga bagaimana memotivasi masyarakat untuk menghargai kualitas sumber daya manusia dengan cara mengikuti pendidikan di sekolah dan atau di lembaga formal lainnya.

3. ***Meningkatkan daya beli masyarakat***, yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendapatan. Di bawah ini ditunjukkan data pengeluaran rata-rata perkapita sebulan di kecamatan-kecamatan Bandung Barat yang relatif masih rendah, walaupun dibandingkan dengan rata-rata di kabupaten induknya relatif lebih tinggi. Rendahnya pengeluaran dapat dijadikan indikator terhadap rendahnya pendapatan masyarakat.

Tabel 4 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan di Bandung Barat (Rupiah)

No	Kecamatan	Untuk Makanan	Bukan makanan	Jumlah
1	Cililin	125,776	51,825	177,601
2	Sindangkerta	99,647	47,214	146,861
3	Gununghalu *)	515,119	591,690	1,106,809
4	Rongga	127,975	62,765	190,740
5	Cipongkor	93,702	29,321	123,023
6	Batujajar	110,101	51,478	161,579
7	Lembang	126,748	43,962	170,710
8	Parongpong	148,192	66,080	214,272
9	Cisarua	123,853	64,706	188,559
10	Ngamprah	121,104	80,402	201,506
11	Padalarang	106,670	67,601	174,271
12	Cipatat	101,261	41,022	142,283
13	Cipeundeuy	109,565	95,652	205,217
14	Cikalong Wetan	78,179	47,224	125,403
15	Cihampelas	-	-	-
	Rata-rata Bandung Barat	141,992	95,782	237,774
	Rata-rata Kabupaten Bandung	112,190	77,759	189,949

Sumber: Suseda, 2003

Keterangan: *) Data yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Berdasarkan Tabel 4, pengeluaran rata-rata perkapita sebulan di Bandung Barat cukup menggembirakan. Hal ini menjadi modal yang cukup baik untuk terus dikembangkan dalam rangka menyongsong pemekaran Bandung Barat. Berdasarkan rata-rata pengeluaran perkapita, Bandung Barat lebih tinggi dari Kabupaten induk yaitu Rp. 237.774,00 (Kabupaten Bandung hanya Rp. 189.949,00/bulan perkapita). Namun demikian, ada hal yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu terkait dengan data di Kecamatan Gununghalu yang mencolok dibandingkan dengan kecamatan lain disekitarnya. Karena itu jika Kecamatan Gununghalu tidak dilibatkan pada perhitungan tabel di atas, angka rata-rata di Bandung Barat menjadi anjlok secara signifikan yaitu hanya Rp. 170.925/bulan perkapita atau di bawah rata-rata Babupaten Bandung. Angka ini menjadi catatan tersendiri dalam perjuangan pemerintah daerah pasca pemekaran, artinya perlu upaya yang komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bandung Barat memang merupakan daerah yang relatif lebih lambat berkembang dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Bandung. Dari 14 kecamatan yang akan menjadi bagian Kabupaten Bandung Barat hanya 3 kecamatan yang angka IPM-nya di atas rata-rata yaitu Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Padalarang, sedangkan kecamatan lainnya di bawah rata-rata Kabupaten Bandung. Bahkan tiga kecamatan terendah IPM-nya di Kabupaten Bandung berada di Bandung Barat ini. Penelusuran rendahnya IPM di Bandung Barat dibuktikan dengan APM yang relatif rendah dan daya beli masyarakatnya yang juga di bawah rata-rata Kabupaten Bandung.

Terlepas dari unsur politis ***pro-kontra*** terhadap pemekaran Bandung Barat, yang pasti adalah bahwa sesaat setelah pemekaran disetujui, maka masyarakat Bandung Barat akan memiliki "modal" IPM 65,1 yang berarti bahwa semua pihak harus bekerja keras dan berjuang "habis-habisan" untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Mengejar ketertinggalan dari kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Semoga!

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2003. *Data Basis untuk Analisis Indeks Pembangunan Manusia*. Jawa Barat. Bapeda Propinsi Jawa Barat dan BPS Propinsi Jawa Barat.

Kompas, edisi 22 Juli 2004

Millah, S. 2004. Potret Pencapaian IPM Jawa Barat. *Artikel*. Pikiran Rakyat edisi 1 September 2004.

Muhammad, M. 2003. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Artikel*. Koran Tempo - Senin, 14 Juli 2003.

Pikiran Rakyat, 6 Februari 2004; edisi 13 Februari 2004; edisi 1 Maret 2004; dan edisi 21 Juli 2004.

PP Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.